

## **Faktor-Faktor Mempengaruhi IPM di Kota Banjarmasin**

**Norma Hayati**

Program Studi Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
[normahayati96@yahoo.com](mailto:normahayati96@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of government spending on education, health, and social protection simultaneously and partially to the HDI in Banjarmasin from 2006 to 2016.*

*The results of the research using the analysis showed that the results of R-square of 0.952 could be interpreted that government expenditures in education, health, and social protection affect the HDI in the city of Banjarmasin from 2006 to 2016. While partially only in education relevant to IPM city Banjarmasin and health, social protection is not partly applicable to HDI in Banjarmasin city.*

**Keywords:** Education, health, social protection, HDI.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara simultan dan parsial terhadap IPM dikota Banjarmasin dari tahun 2006 sampai 2016.

Hasil dari penelitian yang menggunakan analisis menunjukkan bahwa hasil dari R-square sebesar 0,952 dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap IPM dikota Banjarmasin dari tahun 2006 sampai 2016. Sedangkan secara parsial hanya dibidang pendidikan yang relevan terhadap IPM dikota Banjarmasin dan kesehatan, perlindungan sosial tidak relevan secara parsial terhadap IPM dikota Banjarmasin.

**Kata Kunci :** Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, IPM.

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan dari pemerintah daerah adalah pengaturan pembagian dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, yang didalam nya meliputi akar penghasilan daerah dan pengeluaran pemerintah yang berbentuk kapitalisasi, semakin besar keuangan yang dimiliki Negara sehingga meningkatkan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, semakin besar keadaan keuangan suatu negara akan dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk program kesejahteraan masyarakat hal ini karena kapasitas keadaan yang lebih luas akan meresap semakin dalam untuk kegiatan ekonomi dan masyarakat. Sedangkan peran pemerintah dalam APBD sebagai pelaksanaan dari keuangan daerah diharapkan berguna dengan baik dan berhasil. Anggaran yang sudah disiapkan untuk suatu fungsi memperlihatkan tanggung jawab pemerintah terhadap masalah pada pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Semakin besar anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan semakin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah yang memberikan kebijakan tentu memiliki akibat dana yang harus diberikan, dan anggaran pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai sektor-sektor publik yang penting, diantara semua sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas SDM adalah investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial semakin besarnya pengeluaran pemerintah sangat diharapkan semakin dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IPM merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, dan standar hidup layak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara simultan dan secara parsial terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara simultan dan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin.

Adapaun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa alternatif referensi dan bahan masukan bagi pemerintah kota Banjarmasin tentang anggaran penerimaan dan belanja daerah dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain, untuk masalah yang sama atau ada kaitannya dengan masalah tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk produksi suatu barang atau jasa dan APBD, berdasarkan rencana kerja yang dibuat oleh Pemerintah daerah berbentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan melaksanakan kebijakan kesejahteraan publik.(Bastian, 2006).

### **Pendidikan**

“Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan adalah tujuan utama untuk memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang berperan sangat penting dalam membentuk Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan sehingga terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan”. (Tadaro, 2006)

### **Kesehatan**

“Kesehatan adalah prioritas pertama untuk kesejahteraan masyarakat yang ingin diciptakan oleh pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan public, dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah di bidang kesehatan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk sehat dengan memberikan perobatan gratis yang berkualitas dan kesehatan merupakan tingkat masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat”. (Mahmudi, 2007)

### **Perlindungan Sosial**

“Perlindungan sosial sebagai segala bentuk yang diberikan pemerintah, swasta, atau masyarakat mewujudkan pemindahan penghasilan, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan”. (Suharto, 2008)

### **IPM**

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dan sebagai ukuran kualitas hidup”. (UNDP, 1990)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini adalah dilakukan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif yaitu dengan memberikan gambaran dan menganalisis data-data dari instansi yang terkait antara lain Bidang Anggaran Walikota Banjarmasin dan data dari Badan Pusat Statistik kota Banjarmasin. Data yang digunakan adalah data runtun waktu tahunan.

### **Dafinisi Operasional Variabel**

1. Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (X1) diukur dalam satuan rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.
2. Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (X2) diukur dalam satuan rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.
3. Pengeluaran pemerintah dibidang perlindungan sosial (X3) diukur dalam satuan rupiah dan disajikan dalam bentuk juta rupiah.
4. Indeks Pembangunan Manusia IPM (X4) diukur dalam satuan persen dan disajikan dalam bentuk persen.

### **Teknik Analisa Data**

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program computer *eviews* versi 9 Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor dari variabel bebas seperti pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (X<sub>1</sub>) pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (X<sub>2</sub>) dan pengeluaran pemerintah dibidang perlindungan sosial (X<sub>3</sub>) terhadap IPM di Kota Banjarmasin. Berikut adalah model regresinya:

Maka dibuat persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Keterangan :

Y = jumlah indeks pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banjarmasin (persen)

X<sub>1</sub> = Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (Jutaan Rupiah)

X<sub>2</sub> = Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (Jutaan Rupiah)

X<sub>3</sub> = Pengeluaran Pemerinta di Bidang Perlindungan Sosial (Jutaan Rupiah)

B<sub>0</sub> = Konstanta

B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, = Koefisien Regresi

μ = Variabel pengganggu

## HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil dari estimasi dengan menggunakan bantuan dari program *eviews* versi 9 maka diperoleh hasil perhitungan dari masing – masing variabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Linier Berganda**

Simbol	Koefisien	Standar Eror	t-Statistik	Prob.
Pendidikan (X1)	2.55E- 11	2.83E-12	9.008150	0,0000
Kesehatan (X2)	1.86E-11	1.19E- 11	1.566120	0,1613
Perlindungan sosial (X3)	-1.28E-10	1.20E-10	-1.060469	0,3214
Konstanta	61.5404770764			
<i>R-Squared</i>	0.952285	<i>Durbin-Watson</i>	2.390416	
<i>Ajusted R- squared</i>	0.931835			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000054			

*Hasil olahan peneliti*

Dari hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh estimasi dari regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 61.5404 + 2.55 e-11 X1 + 1.86 e-11 X2 - 1.28 e-10 X3 + E$$

Berdasarkan model yang dibentuk terlihat konstanta sebesar 61.80721 menyatakan bahwa jika semua variabel independennya sama dengan 0 (nol) maka indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin sebesar 61.80721. menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin mempengaruhi pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan k`esehatan, dan perlindungan sosial dengan nilai yang cukup tinggi.

Bahwa hanya variabel yang signifikan yaitu jumlah pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan (X1) mempunyai nilai koefisien sebesar 2.55E- 11 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan mempunyai hubungan yang positif. Hal ini mengandung arti bahwa jika jumlah pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan mengalami kenaikan senilai 1 triliun maka IPM mengalami kenaikan senilai 0,00002548 poin.

Jumlah pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan (X2) mempunyai nilai koefisien sebesar 1.86E- 11 mempunyai hubungan yang positif, hal ini mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan mengalami kenaikan 1 triliun maka IPM mengalami kenaikan sebesar 0,0000186 poin.

Jumlah pengeluaran pemerintah dibidang perlindungan sosial (X3) mempunyai nilai koefisien sebesar -1.28E- 10 dan bertanda negative. Hal ini mengandung arti bahwa jika jumlah pengeluaran pemerintah dibidang perlindungan sosial mengalami kenaikan senilai 1 triliun maka IPM mengalami penurunan senilai - 0,0000128 poin.

Untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat melalui koefisien Korelasi (R). Sedangkan untuk melihat seberapa

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui koefisien determinasi (*R Squared*).

Uji F keberartian model ini untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas yang terdapat dalam model secara simultan terhadap variabel terkait. Hasil dari regresi tersebut menggunakan taraf keyakinan 95% ( $\alpha = 5$  persen), untuk menghitung  $F_{tabel}$  digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= \alpha : (K-1) (n-K) \\
 &= 0,05 : (4-1) (11-4) \\
 &= 0,05 : 3.7 \text{ (Menggunakan tabel F)} \\
 &= 4,35 \\
 \alpha &= 0,05 \\
 n &= \text{banyak tahun (11 Tahun)} \\
 K &= \text{jumlah variabel (4)}
 \end{aligned}$$

Jika dilihat berdasarkan hasil dari kelayakan model menunjukkan nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  ( $F_{hitung} 46,567 > 4,35 F_{tabel}$ ) berdasarkan probabilitas dapat dilihat signifikansi senilai  $0,000 < 0,050$  dapat diartikan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terkait.

Jika dilihat berdasarkan hasil dari kelayakan model menunjukkan hasil regresi memperoleh nilai  $R^2$  ( R-Square) sebesar 0,952. Hal ini berarti sebesar 95,2% menunjukkan bahwa variabel bebas cukup mempengaruhi sedangkan sisanya sebesar 4,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Determinasi (Uji R) keberartian model ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memperlihatkan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dikota Banjarmasin pada tahun 2006-2016 menggunakan taraf keyakinan 90% ( $\alpha = 5$  persen), untuk menghitung  $F_{tabel}$  digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 T_{tabel} &= \frac{\alpha}{2} : (n-K) \\
 &= \frac{0,05}{2} : (11- 4) \\
 &= 0,025 : 7 = 2,365 \text{ (Menggunakan Tabel t)} \\
 \alpha &= 0,05 \\
 n &= \text{banyak tahun (11 Tahun)} \\
 K &= \text{jumlah variabel (4)}
 \end{aligned}$$

Pada program *evIEWS* versi 9 diperoleh hasil perhitungan untuk masing-masing variabel bebas Berikut secara rinci adalah hasil regresi linier berganda *evIEWS* versi 9 :

**Tabel 2**  
**Hasil Uji t**

Simbol	Koefisien	t- Statistik	Sig.
Pendidikan (X1)	2.55E- 11	9.00815	0,0000

Kesehatan (X2)	1.86E-11	1.56612	0,1613
Perlindungan sosial (X3)	-1.28E-10	-1.0605	0,3214

*Hasil olahan peneliti*

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan berpengaruh relevan terhadap indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin dengan tingkat alpha 5 persen atau 0,05 dimana variabel pendidikan memiliki nilai prob sebesar 0,0000 sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dan perlindungan sosial menunjukkan tidak signifikan dan negative terhadap indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin dimana variabel kesehatan memiliki nilai prob sebesar 0,1613 dan variabel perlindungan sosial memiliki nilai prob 0,3214.

Dibidang pendidikan dengan harapan meningkat anggaran dengan adanya program – program yang sangat banyak diberikan kebijakan oleh pemerintah program wajib belajar sembilan tahun dan sekarang diwajibkan sampai dua belas tahun untuk belajar , program bantuan dana operasional sekolah sehingga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin.

Dibidang kesehatan dengan harapan menaikkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dengan memberikan beberapa program yang telah dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan kesehatan yang berdampak positif terhadap peningkatan IPM dikota Banjarmasin, tetapi malah sebaliknya pada bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur bukan untuk memperbaiki gizi masyarakatnya.

Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada harusnya anggaran dibidang kesehatan dan pendidikan tidak perlu dimasukkan lagi dalam anggaran perlindungan sosial karena anggaran kesehatan dan pendidikan sudah memiliki anggaran yang tersendiri yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau disebut kurang tepat sasaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Secara simultan variabel pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap IPM dikota Banjarmasin.
2. keseluruhan variabel hanya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dikota Banjarmasin dengan secara parsial.

### **Saran**

1. Bagi pemerintah daerah kota Banjarmasin yang menentukan kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Maka perlu ditingkatkan lagi walaupun pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan ini berpengaruh relevan terhadap IPM dikota Banjarmasin.
2. Bagi pemerintah daerah kota Banjarmasin perlu juga memperhatikan pada pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan dan perlindungan sosial dalam membuat kebijakan, sehingga pada periode masa yang akan mendatang agar berpengaruh relevan terhadap IPM dikota Banjarmasin.

3. Bagi akademisi, diharapkan dapat melakukan penelitian yang berhubungan dengan perlindungan sosial dengan variabel lain atau indikator yang berbeda seperti perlindungan anak dibawah umur dan perlindungan sosial lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan bagaimana cara mengatasi dan mencari solusi bagi variabel yang berpengaruh namun tidak signifikan.

#### **DAFTAR FUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor publik* : suatu pengantar: Jakarta : Erlangga
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).
- Suharto, Edi 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- UNDP, 1990. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.